

Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Nurul Huda¹; Dadang Sadeli²; Hermiyetti³

¹Staf Kantor Kelurahan Petamburan Privinsi DKI Jakarta

^{2,3}Program Studi Magister Akuntansi

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila – Jakarta

Email : ¹nrlhuda77@gmail.com, ³hermi_yetti@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan sistem pengadaan barang/jasa terhadap pencegahan kecurangan pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Populasi pada penelitian ini adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu yang masuk dalam kelompok kerja reguler dan kelompok kerja tertentu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), dan sistem pengadaan barang/jasa (X_3), sedangkan variabel dependen adalah pencegahan kecurangan (*fraud*). Data dianalisis dengan menggunakan analisa regresi linear berganda (*multiple regression*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X_2) dan sistem pengadaan barang/jasa (X_3) yang berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), sedangkan kompetensi (X_1) tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal dan sistem pengadaan barang/jasa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Kata Kunci

Kompetensi, Sistem pengendalian internal, Sistem pengadaan barang/jasa, Pencegahan kecurangan.

Abstract

This study purposes to examine the influence of competency, internal control system, and the system of procurement of goods/service to prevent fraud in the Procurement Committee for Goods/Service of DKI Jakarta Province. The population in this study is the Procurement of Goods/Service Committee in the Goods/Service Procurement Service Agency of DKI Jakarta Province that occupies a Specific Functional Job which is included in regular working group and certain work group. The independent variables in this study are competency (X_1), internal control system (X_2), and the system of procurement of goods/services (X_3), while the dependent variable is fraud prevention. Data was analyzed using multiple linear regression analysis. The result showed that the internal control system (X_2) and the goods/service procurement system (X_3) had a partial effect on fraud prevention while competence (X_1) had no effect on fraud prevention. The result of the study also show that competence, internal control system and the procurement of goods/services together have a significant effect on the prevention of fraud.

Keywords

Competence, Internal control system, Goods/service procurement system, Fraud prevention.

Pendahuluan

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Salah satu sektor publik yang diragukan akuntabilitas dalam pelaksanaannya adalah tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah atau yang lebih dikenal dengan lelang (*procurement*). Pengadaan barang/jasa pemerintah diartikan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBD/APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola, maupun oleh penyedia barang/jasa pemerintah atau dunia usaha.

Pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik tentunya akan memberikan gambaran bagaimana pengadaaan tersebut terkelola secara transparan, dan adanya pertanggungjawaban dan kewajiban sehingga kinerja pengadaan barang/jasa dapat sesuai seperti yang ditentukan sebelumnya. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dirasakan, akibatnya muncul berbagai penyimpangan, penyelewengan, penyelundupan dan korupsi.

Selama ini proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara manual atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) di mana dalam pelaksanaannya langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa pemerintah dan pengguna barang/jasa pemerintah atau panitia pengadaan. Pengadaan yang dilakukan secara manual dinilai memiliki beberapa kelemahan yang banyak merugikan sehingga menjadi ladang tumbuh suburnya tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diakibatkan karena tidak transparannya pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain bahkan merugikan keuangan perusahaan/negara. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar yang tugas fungsionalnya menjalankan sistem pengendalian intern serta mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan.

Fenomena yang terjadi terkait kasus *Fraud* yang terjadi di DKI Jakarta adalah kasus pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 sebesar Rp 1,5 triliun. Hasil telaah sementara jaksa menemukan adanya penyalahgunaan dalam kegiatan pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp 1 triliun, dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar. Selain itu kasus lain juga terdapat pada pengadaan kapal kataraman yang digunakan untuk menyeberang ke kepulauan Seribu pada tahun 2012 oleh sejumlah pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ketiga pejabat tersebut diduga menggelembungkan harga kapal dan menghadirkan kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi (Tempo, 2014). Kalau saja proses pengadaannya dilaksanakan secara transparan sesuai dengan peraturan

Nurul Huda dkk

Pengaruh Kompetensi,
Sistem Pengendalian
Internal, Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk
Pencegahan Kecurangan
(*Fraud*) pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

perundang-undangan yang berlaku, tentunya kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi sehingga uang negara yang di korupsi dapat diselamatkan serta dapat dialokasikan untuk kepentingan lain, misalnya meningkatkan kesejahteraan rakyat atau hal-hal lain yang lebih produktif.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor *fraud* pengadaan barang/jasa, sehingga dalam jangka waktu selanjutnya tindakan *fraud* dapat diminimalkan serta secara perlahan sistem yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa akan menjadi lebih baik. Dalam pembahasan ini *fraud* atau kecurangan yang dimaksudkan adalah praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain, bahkan kecurangan yang dilakukan dapat merugikan keuangan perusahaan/negara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, pertama obyek penelitian yang berbeda, yaitu di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) pada kantor pemerintah provinsi DKI Jakarta. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta adalah suatu unit kerja yang terdiri dari pegawai negeri sipil pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Dengan kata lain bagian ini merupakan salah satu bagian dari kantor pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bertugas melayani segala jenis pengadaan barang/jasa yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini juga dikarenakan BPPBJ adalah pusat pengadaan barang/jasa yang harus setiap panitia memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, penelitian ini juga ingin meneliti lebih lanjut pengaruh kompetensi, pengendalian intern dan sistem pengadaan barang dan jasa dalam rangka pencegahan *fraud* (kecurangan) pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

1. Kompetensi yang tinggi menyebabkan peningkatan tingkat pencegahan *fraud* (kecurangan).
2. Lemahnya efektivitas sistem pengendalian internal dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum berjalan dengan baik sehingga menimbulkan pencegahan kecurangan yang rendah.
4. Belum kuatnya komitmen organisasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Budaya organisasi yang masih bisa terintervensi.

Metodologi

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kausalitas, jenis ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, dan sistem pengadaan barang dan jasa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui survei dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) pengaruh kompetensi, pengendalian intern dan sistem pengadaan barang dan jasa terhadap pencegahan *fraud* (kecurangan) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari aparat Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada kantor pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai responden dalam penelitian ini.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi, bagian kedua berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan pengendalian intern, bagian ketiga berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan sistem pengadaan barang/jasa, dan bagian keempat berisikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan pencegahan *fraud* (kecurangan).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu sebanyak 123 orang.

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu penyebaran kuisisioner dilakukan pada semua populasi. Jumlah kuisisioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 123 kuisisioner.

Uji Hipotesis

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yang bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka model matematis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

di mana:

Y = pencegahan *fraud*.

a = konstanta.

β = koefisien regresi masing-masing variabel independen.

X_1 = variabel kompetensi.

X_2 = variabel pengendalian internal.

X_3 = variabel sertifikasi pengadaan barang/jasa.

ε = *standard error*.

Nurul Huda dkk

Pengaruh Kompetensi,
Sistem Pengendalian
Internal, Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk
Pencegahan Kecurangan
(*Fraud*) pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang terbaik dalam analisis regresi dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui prosentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel independen akan mampu menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Nilai koefisien R^2 mempunyai interval nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Untuk menghindari bias, maka digunakan nilai *Adjusted R^2* , karena *Adjusted R^2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.

Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji statistik nilai t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dari besarnya p -value. Apabila p -value lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji F (Uji Secara Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel ANOVA. Jika nilai $sig \leq \alpha = 0,05$ maka terdapat satu atau lebih variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen (hipotesis alternatif yang dirumuskan diterima).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa instrumen keempat variabel memiliki angka reliabilitas yang cukup tinggi, karena angka Cronbach's Alpha (α) di atas 0,60 yang menunjukkan bahwa konstruk atau variabel adalah reliabel. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai α	Kesimpulan
1	Kompetensi (X_1)	0,901	Andal/reliabel
2	Sistem Pengendalian Internal (X_2)	0,826	Andal/reliabel
3	Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (X_3)	0,941	Andal/reliabel
4	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,636	Andal/reliabel

Uji Validitas Variabel Kompetensi

Dari 11 pertanyaan yang diuji coba, semua butir dinyatakan valid karena memiliki r_{hitung} lebih tinggi dari r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,1771. Rangkuman dari hasil uji validitas variabel ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X₁)

No. Butir Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Keterangan
1	0,834	Valid
2	0,631	Valid
3	0,636	Valid
4	0,678	Valid
5	0,939	Valid
6	0,424	Valid
7	0,668	Valid
8	0,419	Valid
9	0,939	Valid
10	0,621	Valid
11	0,921	Valid

Nurul Huda dkk

Pengaruh Kompetensi,
Sistem Pengendalian
Internal, Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk
Pencegahan Kecurangan
(*Fraud*) pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Dari 39 pertanyaan yang diuji coba, semua butir dinyatakan valid karena memiliki r_{hitung} lebih tinggi dari r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,1771. Rangkuman dari hasil uji validitas variabel ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal (X₂)

No. Butir Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Keterangan
12	0,226	Valid
13	0,404	Valid
14	0,181	Valid
15	0,317	Valid
16	0,361	Valid
17	0,293	Valid
18	0,168	Valid
19	0,399	Valid
20	0,359	Valid
21	0,453	Valid
22	0,399	Valid
23	0,420	Valid
24	0,456	Valid
25	0,367	Valid
26	0,244	Valid
27	0,230	Valid
28	0,329	Valid
29	0,485	Valid
30	0,577	Valid
31	0,665	Valid
32	0,427	Valid
33	0,183	Valid
34	0,385	Valid
35	0,298	Valid
36	0,298	Valid
37	0,231	Valid
38	0,405	Valid
39	0,472	Valid
40	0,420	Valid
41	0,324	Valid
42	0,423	Valid
43	0,336	Valid
44	0,272	Valid
45	0,337	Valid
46	0,343	Valid
47	0,498	Valid
48	0,561	Valid
49	0,194	Valid
50	0,333	Valid

Uji Validitas Variabel Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Dari 35 pertanyaan yang diuji coba, semua butir dinyatakan valid karena memiliki r_{hitung} lebih tinggi dari r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,1771. Rangkuman dari hasil uji validitas variabel ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (X_3)

No. Butir Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Keterangan
51	0,484	Valid
52	0,537	Valid
53	0,563	Valid
54	0,563	Valid
55	0,612	Valid
56	0,513	Valid
57	0,502	Valid
58	0,457	Valid
59	0,510	Valid
60	0,530	Valid
61	0,601	Valid
62	0,639	Valid
63	0,612	Valid
64	0,533	Valid
65	0,552	Valid
66	0,560	Valid
67	0,566	Valid
68	0,571	Valid
69	0,621	Valid
70	0,630	Valid
71	0,353	Valid
72	0,565	Valid
73	0,654	Valid
74	0,636	Valid
75	0,584	Valid
76	0,619	Valid
77	0,929	Valid
78	0,873	Valid
79	0,544	Valid
80	0,639	Valid
81	0,533	Valid
82	0,642	Valid
83	0,560	Valid
84	0,532	Valid
85	0,500	Valid

Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Dari 10 pertanyaan yang diuji coba, hanya 7 butir dinyatakan valid karena memiliki r_{hitung} lebih tinggi dari r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,2133. Rangkuman dari hasil uji validitas variabel ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud* (Y)

No. Butir Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Keterangan
1	0,333	Valid
2	0,535	Valid
3	0,565	Valid
4	0,560	Valid
5	0,471	Valid
6	0,534	Valid
7	0,635	Valid
8	0,556	Valid
9	0,367	Valid

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji simultan terhadap model persamaan regresi linier berganda berupa Tabel ANOVA (uji distribusi F) dapat dilihat pada Tabel 6, sedangkan uji parsial terhadap variabel-variabel independen (uji distribusi t) dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6 Hasil Uji Simultan Persamaan Regresi Linier Berganda (Uji Distribusi F)

Source	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	100,842	3	33,614	12,067	0,000
Residual	331,500	119	2,786		
Total	432,341	122			

Berdasarkan Tabel 6, F_{hitung} (12,067) lebih besar dari F_{tabel} (2,68) dengan signifikansi yaitu $p-value$ (0,000) lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi layak dan dapat digunakan untuk memprediksi atau variabel independen (kompetensi, sistem pengendalian internal dan pengadaan barang/jasa) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (pencegahan *fraud*).

Tabel 7 Hasil Uji Parsial Variabel Independen (Uji Distribusi t)

Variable	Unstandardized Coefficients		Std. Coeff.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,114	6,653		0,468	0,641
Kompetensi	0,080	0,042	0,154	1,912	0,058
Sistem Pengendalian Internal	0,131	0,026	0,399	4,951	0,000
Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa	0,068	0,020	0,278	3,443	0,001

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa variabel kompetensi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf 5%, sedangkan variabel lainnya berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh persamaan model regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pencegahan } Fraud &= 3,114 + 0,080 \text{ kompetensi} \\ &+ 0,131 \text{ sistem pengendalian internal} \\ &+ 0,068 \text{ sertifikasi pengadaan barang/jasa} + \varepsilon \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis data juga diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,483 mendekati 0,5; yang mengindikasikan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat. Koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) model regresi dalam penelitian ini adalah 0,214. Artinya, besarnya variasi variabel dependen (pencegahan *fraud*) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen (kompetensi, sistem pengendalian internal dan sertifikasi pengadaan barang/jasa) adalah sebesar 21,4%, sedangkan sisanya sebesar 78,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang dianggap tetap yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh kompetensi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis di atas diketahui bahwa level signifikansi independen yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari level signifikansi pendugaan yang ditetapkan, yaitu $0,058 > 0,05$ yang berarti kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi seseorang yang mempunyai kemampuan/kompeten dalam bidang tertentu tetapi memiliki keinginan berbuat kecurangan tetap ada dalam suatu organisasi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang dimiliki oleh seseorang berupa kemampuan mengerjakan tugas, wewenang dan tanggungjawab dengan kinerja tinggi yang meliputi sikap (*attitude*); pengetahuan (*knowledge*); dan keterampilan (*skill*) yang dimiliki. Penelitian ini sejalan dengan Hendriani (2013), dan Vona (2008) tetapi tidak sejalan dengan Moyes (1996).

2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis di atas diketahui bahwa level signifikansi independen yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dari level signifikansi pendugaan yang ditetapkan, yaitu $0,000 < 0,05$, yang berarti sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini mendukung pernyataan COSO yang menyatakan bahwa *fraud* yang mungkin terjadi harus dicegah, di antaranya dengan membangun struktur pengendalian internal yang baik. Pendapat lain dinyatakan oleh Tunanakotta (2010) yang menyatakan bahwa upaya pencegahan *fraud* dimulai dari pengendalian.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gusnardi (2008), dan Hendriani (2013), penelitian sebelumnya membuktikan bahwa dengan adanya pengendalian intern yang lemah maka kemungkinan terjadinya *fraud* makin besar sebaliknya dengan pengendalian intern yang baik maka *fraud* dapat dibatasi dan berkurang.

3. Pengaruh sertifikasi pengadaan barang/jasa terhadap pencegahan *fraud*

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis di atas diketahui bahwa level signifikansi independen yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang lebih kecil dari level signifikansi pendugaan yang ditetapkan, yaitu $0,001 < 0,05$ yang berarti sertifikasi pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara *online* dalam proses

pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat memberi manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standarisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi, efektivitas dan efisiensi anggaran yang lebih baik.

4. Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan sertifikasi pengadaan barang/jasa secara simultan terhadap pencegahan *fraud*

Dalam penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal dan sertifikasi pengadaan barang/jasa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Nurul Huda dkk

Pengaruh Kompetensi,
Sistem Pengendalian
Internal, Sertifikasi
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk
Pencegahan Kecurangan
(*Fraud*) pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, yakni pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa: 1) variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*; 2) variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*; 3) variabel sertifikasi pengadaan barang/jasa berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*; dan 4) variabel kompetensi, sistem pengendalian internal dan sistem pengadaan barang/jasa secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Daftar Pustaka

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jatiningtyas, N. (2011). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah di wilayah Semarang. *Tesis*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Najahningrum, A.F. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud*: persepsi pegawai dinas provinsi DIY. *Journal.unnes.ac.id*.
- Sartono. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tuanakotta, T. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wilopo. (2006). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Zulkarnain, R.M. (2013). Analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada Dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*, 1(3).